



**Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial**  
Volume 8 , Issues 2, 2019

---

MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL: Peran Pusat Dukungan Anak Dan Keluarga di Panti Asuhan Yogyakarta

Author : Dwi Papsa

Source : Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Volume 8, Issues 2, 2019, 140-163.

To Cite the Article :

MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL: Peran Pusat Dukungan Anak Dan Keluarga di Panti Asuhan, Papsa Dwi, Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Volume 8, Issues 2, 2019

Copyright © 2019 Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial  
ISSN : 2303-3759 (Print), ISSN : 2685-8517 (Online)



**Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial**  
**Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**



**MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL: Peran Pusat Dukungan Anak Dan Keluarga di Panti Asuhan Yogyakarta**

**Dwi Papsa**

[dwipapsa@gmail.com](mailto:dwipapsa@gmail.com)

Balai Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak DIY

**Abstract**

*This study aims to determine how the role played by the Sayangi Tunas Cilik Foundation Partner of Save the Children Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) program in building social service management in Yogyakarta orphanages. The results showed that there were several roles, namely the facilitative role through the socialization of the application of the National Childcare Standards (SNPA), the educational role through training in the form of workshops and capacity building in case counseling, the role of representatives through PDAK efforts in assisting the completeness of LKSA accreditation administration and the technical role through data processing training with a case management approach. The results of the role of building service management include understanding and developing LKSA's capabilities in family-based care, implementing case management, and acknowledging LKSA through accreditation. All the assistance roles carried out by PDAK are to increase family-based care and instill a culture of good parenting, and to support the recognition of the LKSA service system through LKSA accreditation.*

**Keywords:** *Role of PDAK, management of social services, children and families*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik Partner of Save the Children dalam program Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) dalam membangun manajemen pelayanan sosial di panti asuhan Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa peran, yaitu peran fasilitatif melalui sosialisasi penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA), peran edukatif melalui pelatihan berupa workshop dan peningkatan kemampuan berupa konseling kasus, peran perwakilan melalui upaya PDAK dalam mendampingi kelengkapan administrasi akreditasi LKSA dan peran teknis melalui pelatihan pengolahan data dengan pendekatan manajemen kasus. Hasil peran membangun manajemen pelayanan tersebut diantaranya adalah pemahaman dan pengembangan kemampuan LKSA dalam pengasuhan berbasis keluarga, penerapan manajemen kasus, dan pengakuan LKSA melalui akreditasi. Semua peran pendampingan yang dilakukan PDAK adalah untuk meningkatkan pengasuhan berbasis keluarga dan menanamkan budaya good parenting, serta guna mendukung pengakuan sistem pelayanan LKSA melalui akreditasi LKSA.

**Kata kunci:** *Peran PDAK, manajemen pelayanan social, anak dan keluarga*



## A. PENDAHULUAN

Anak memiliki posisi dan proposi strategis dalam kehidupan skala mikro seperti keluarga dan skala makro seperti komunitas. Karena posisi dan potensinya itulah, maka anak harus diberi kesempatan dan jaminan yang memadai untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik jasmani, rohani, dan sosialnya<sup>1</sup>. Faktanya tidak seperti yang diharapkan kondisi anak sendiri terancam. Banyak faktor yang menyebabkan anak terancam dalam tumbuh kembangnya, salah satu faktornya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global baik di negara maju atau negara berkembang. Anak-anak yang lahir di keluarga miskin, memiliki kesempatan kecil untuk memperoleh kehidupan yang layak, mereka tidak memiliki jaminan sosial, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sesuai<sup>2</sup>.

Indonesia sendiri juga terdapat masyarakat atau keluarga miskin, dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 sebanyak 27.727.780 juta dengan presentasi 11,25%.<sup>3</sup> Meski bukan merupakan satu-satunya faktor pencipta anak-anak rawan, tetapi dampak kemiskinan sangat terasa pada alokasi waktu dan pemberian akses keterpenuhan hak anak semakin berkurang bahkan tidak ada sama sekali, kondisi inilah yang menciptakan anak rawan dari keluarga miskin tinggi<sup>4</sup>.

Situasi anak di Indonesia memiliki realitas yang beragam seperti anak berhadapan dengan hukum, anak penyandang disabilitas, anak balita terlantar, *childe Abuse*, pekerja anak, kekerasan seksual, anak jalanan, dan anak terlantar. Anak-anak ini biasa disebut dengan ‘anak rawan’. Penamaan anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan acap kali pula dilanggar hak-haknya. *Inferior*, rentan dan marginal adalah beberapa ciri umum anak-anak

---

<sup>1</sup> Ajat Kurnia, “Empowering dan Networking: Alternatif Penanggulangan Anak Jalanan,” *Jurnal ilmiah Peksos* 3, no. 2 (2004): 489.

<sup>2</sup> Departemen Sosial RI, *Model Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Keluarga dengan Pendekat Multisystem* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, 2004), hlm 239.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, *Indonesia Dalam Angka*, 2015.

<sup>4</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 3.

rawan<sup>5</sup>. Situasi tersebut layak untuk diperhatikan mengingat jumlah anak rawan di Indonesia tidak sedikit. Data jumlah anak rawan di Indonesia pada 2014

| No     | Kategori Anak Rawan          | JUMLAH               |
|--------|------------------------------|----------------------|
| 1      | Anak terlantar               | 3.115.177            |
| 2      | Anak balita terlantar        | 1.224.168            |
| 3      | Anak berhadapan dengan Hukum | 146.228              |
| 4      | Anak Jalanan                 | 134.903              |
| 5      | Anak penyandang disabilitas  | 532.130              |
| JUMLAH |                              | 5.152.606<br>(6,76%) |

Sumber : Kementrian Sosial RI

Kalau melihat jumlah anak Indonesia yang berumur 18 tahun kebawah sebanyak 79.898.000 juta, sedangkan berdasarkan tabel di atas jumlah anak rawan di Indonesia tahun 2014 adalah 5.152.606 juta anak, maka anak rawan berkisar 6,67%. Dari jumlah anak rawan itu, mayoritas kurang atau bahkan tidakmendapat penanganan dan perlindungan dari instansi dan keluarga. Jumlah anak rawan yang tersaji pada tabel merupakan hasil dari akumulasi provinsi di Indonesia, salah satu provinsi yang menjadi penyumbang jumlah anak rawan adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Data anak rawan di Provinsi Yogyakarta tahun 2015

| Kabupaten/<br>Kota | Anak<br>Terlantar | Anak<br>Balita<br>Terlantar | Anak<br>Berhadapan<br>Dengan<br>Hukum | Anak<br>Jalanan | Anak<br>Penyandang<br>Disabilitas |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Kulon Progo        | 4.443             | 534                         | 10                                    | 44              | 394                               |
| Bantul             | 3.341             | 263                         | 120                                   | 52              | 1.332                             |
| Gunung Kidul       | 6.777             | 816                         | 63                                    | 47              | 482                               |
| Sleman             | 5.197             | 333                         | 64                                    | 34              | 1.435                             |
| Kota Jojga         | 331               | 32                          | 45                                    | 42              | 653                               |
| D I.<br>Yogyakarta | 20.089            | 1.978                       | 302                                   | 219             | 4.296                             |

Sumber : BPS DIY, BP2M DIY

<sup>5</sup>Bagong suyanto, *Masalah Sosial Anak*, hlm. 3.

Dari data di atas Provinsi DIY menunjukkan tingkat anak rawan dengan jumlah relatif tinggi yakni, Anak terlantar sebanyak 20.089 ribu, anak balita terlantar sebanyak 1.978 ribu, anak berhadapan dengan hukum sebanyak 302, anak jalanan sebanyak 219, dan anak penyandang disabilitas sebanyak 4.296 ribu, total anak rawan di Yogyakarta sebanyak 26.884 ribu anak. Jumlah ini menggambarkan masih banyaknya anak rawan di Yogyakarta dan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi masalah sosial anak. Situasi yang dipaparkan di atas, menunjukkan jumlah anak rawan di Indonesia masih tergolong tinggi dan ini merupakan tugas serta fungsi Negara dalam mengambil tanggung jawab untuk memelihara anak terlantar yang sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit mengatakan bahwa Negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.<sup>6</sup>

Melalui lembaga *Yayasan Sayangi Tunas Cilik Partner of Save the Children* dan Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dukungan dari UNICEF adalah dengan melakukan penelitian tentang kualitas pengasuhan anak di Panti Sosial Asuhan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan gambaran yang komprehensif tentang kualitas pengasuhan di Panti Sosial Pengasuhan<sup>7</sup>. Panti asuhan harus berfungsi sebagai pusat layanan bagi anak dan keluarga. Karenanya, untuk memposisikan panti secara tepat sebagai institusi yang melaksanakan fungsi tersebut, nama Panti Sosial Asuhan Anak dirubah menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).<sup>8</sup>

PDAK merupakan program khusus untuk merespon dan mendukung pengasuhan anak dalam keluarga karena anak-anak memiliki hak untuk tinggal bersama keluarga. Program ini ada pada wilayah non panti, panti social dan panti asuhan.<sup>9</sup> Dalam ruang lingkupnya PDAK memiliki tugas untuk peningkatan penerapan Standard Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) untuk LKSA. PDAK membantu LKSA dalam melakukan

---

<sup>6</sup>Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 34, ayat 1

<sup>7</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, BAB I Pendahuluan.

<sup>8</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak, hlm.6.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Project Coordinator Families Firsts DIY, 3 februari 2016

pelayanan sosial oleh karena itu PDAK membangun manajemen pelayanan sosialnya untuk mendorong agar panti asuhan sesuai dengan standard yang sudah ditentukan. Banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan manajemen, dan pada akhirnya, tak dapat dipungkiri bahwa manajemen memang diperlukan bagi semua orang, baik dalam kelembagaan formal maupun kelembagaan informal.<sup>10</sup>

Kegiatan PDAK tersebut, berlandaskan dari realita yang ada mengenai pelayanan panti kesejahteraan sosial di Indonesia cenderung masih konvensional, artinya pelayanan yang diberikan LKSA masih hanya pemenuhan kebutuhan dasar (pakaian, tempat tinggal, dan makanan), seharusnya pelayanan LKSA sudah mengarah pada kegiatan yang komprehensif atau pemberian pelayanan dasar dan pemberdayaan. Kondisi ini antara lain disebabkan karena masih rendahnya sumber daya (6M)<sup>11</sup> yang dimiliki lembaga. Secara lebih operasional, mengkaji kualitas pelayanan sebuah lembaga pelayanan sosial tidak dapat dipisahkan dari penilaian terhadap sistem kelembagaan secara keseluruhan<sup>12</sup>. Adanya factor keterbatasan sumber daya itu mendorong terbentuknya kondisi yang mengakibatkan rendahnya mutu pelayanan social kepada anak yaitu; (1) pelayanan social kepada anak cenderung sektoral dan fragmatis, (2) Pengembangan program cenderung berdasarkan tren isu actual, (3) sumber daya pelayanan terbatas, (4) program dibuat cenderung reaktif dan berorientasi pada pemecahan masalah kritis, (5) focus pelayanan bertumpu pada pendekatan institusi / panti social dan cenderung mengabaikan pendekatan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan gambaran diatas terdapat permasalahan yang perlu untuk diketahui bersama. Tujuan dari permasalahan tersebut yakni untuk mengetahui, menggambarkan, dan mendiskripsikan peran pusat Dukungan anak dan keluarga dalam membangun model manajemen pelayanan social di panti asuhan Yogyakarta.

---

<sup>10</sup> Ranupandojo Heijrachman, *Teori dan Konsep Manajemen* (Yogyakarta: UPP-AMPYKPN, 2014), hlm 15.

<sup>11</sup> 6 M : *Man, Money, Methods, Materials, Machines, Market*

<sup>12</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm 185.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah adalah penelitian yang dilakukan dengan adanya fakta-fakta yang terjadi. Salah satunya penelitian yang dilakukan dilapangan, oleh karena itu dalam penelitian harus ada data-data valid atau benar yang menjadi fakta suatu penelitian ilmiah. Menurut pengertian ini, metode penelitian bermakna sebagai strategi-strategi yang dilakukan oleh para peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan<sup>13</sup>. Penelitian yang akan digunakan peneliti dalam meneliti Peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) dalam Membangun Manajemen Pelayanan Sosial di Panti Asuhan Yogyakarta adalah penelitian bersifat diskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang valid dan menunjang penulisan artikel, metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data.

Dalam penelitian ini akan diambil dua informan, yang pertama adalah informan formal. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam melakukan penentuan informan formal. Teknik ini diambil berdasarkan pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi informan penting dalam penelitian ini terdiri dari, pertama *Project Coordinator Families first* DIY, kedua *Direct response officer*. Informan yang kedua adalah informan informal dengan menggunakan teknik snow ball sampling teknik yang mula mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Adapun informan informal dalam penelitian ini adalah pekerja sosial yang bekerja di program Pusat Dukungan Anak dan Keluarga.

Validasi data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yakni teknik untuk memperbaiki kemungkinan-kemungkinan temuan dan interpretasi dapat dipercaya. Data yang diperoleh dicek kembali pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda atau menggunakan sumber yang berbeda. Teknik ini membantu peneliti me-rechek temuan di lapangan dengan cara membandingkan dengan berbagai metode, sumber, atau teori<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

<sup>14</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).

## C. TINJAUAN KONSEPTUAL

### 1. Kesejahteraan Sosial Anak

Anak adalah seseorang yang berusia belum 18 tahun termasuk anakyang masih dalam kandungan<sup>15</sup>, pengertian yang lain anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalamimasa pubertas<sup>16</sup>. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh,serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan dan mendukung perlu dilaksanakan pemeliharaan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani,jasmani, maupun social<sup>17</sup>. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam undang-undang ini diuraikan tentang usaha kesejahteraan anak, yakni:

Usaha kesejateraan anak terdiri dari (1) Usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi, (2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, (3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dilaksanakan baik dalam maupun diluar panti, (4) pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat, dan yang terakhir pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai yang tertulis sebelumnya (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.<sup>18</sup>

Kebijakan pemerintah telah mefokuskan panti asuhan sebagai alternatif terakhir pengasuhan anak diluar keluarganya, namun dari hasil penelitian tentang kualitas pengasuhan anak di panti asuhan terdapat temuan bahwa panti asuhan hanya berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan akses pendidikan kepada anak dari pada sebagai lembaga

---

<sup>15</sup> Undang-undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>16</sup> Dkk Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), hlm 16.

<sup>17</sup> Taufik Makarao, hlm 14.

<sup>18</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, BAB IV pasal 11 ayat 1-4



alternatif terakhir pengasuhan anak.<sup>19</sup> Karena itu panti asuhan mulai memerlukan pembinaan tentang sumber daya manusia dan manajemen agar tercapainya pelayanan dan perlindungan anak.

## 2. Manajemen Organisasi Pelayanan Sosial

Organisasi sebagai suatu wadah yang didalamnya terdapat proses manajemen, organisasi dan manajemen memiliki hubungan erat dan saling mempengaruhi. Manajemen sebagai sistem adaptif dalam organisasi sehingga manajemen organisasi yang baik dan benar diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuannya.<sup>20</sup>

Dalam organisasi Budaya akan menjadi cara kerja bagaimana manajemen berjalan dalam organisasi. Budaya merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan dan tingkah laku. Budaya organisasi mengacu pada nilai-nilai umum, kepercayaan, norma, dan perilaku. Budaya organisasi juga meliputi symbol, logo, kebiasaan, budaya organisasi penting dalam teori organisasi kerana mempengaruhi semua aspek organisasi seperti bagaimana tujuan dirumuskan, bagaimana hubungan personal, bagaimana pekerjaan dibentuk, dan bagaimana perilaku budaya kerja organisasi<sup>21</sup>.

Budaya organisasi berhubungan dengan persepsi anggota terhadap karakteristik budaya didalam suatu organisasi, baik budaya itu mendukung atau menghambat kinerja, artinya budaya itu merupakan hal penting sebab dapat membedakan konsep organisasi satu dengan yang lain.

## 3. Pendekatan Penyembuhan Anak Rawan

Pendekatan untuk mengatasi masalah anak rawan adalah dengan pengasuhan yang baik. Pengasuhan yang memenuhi kebutuhan anak dapat menggunakan 2 pendekatan pengasuhan Keluarga. Keluarga sendiri adalah kelompok orang yang ada hubungan darah atau pernikahan yang

Terdiri dari ibu, ayah, dan anak-anak. keluarga mempunyai penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak,

---

<sup>19</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, hlm 4

<sup>20</sup> Abdulsyani, *Manajemen Organisasi* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1997), hlm 25.

<sup>21</sup> Agus Joko P, *Teori Organisasi* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), hlm 9.

dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu<sup>22</sup>. Pendekatan pengasuhan keluarga yang digunakan untuk mengatasi anak rawan adalah sebagai berikut :

a. *Attachment* (kelekatan)

Kelekatan merupakan suatu ikatan emosional yang kuat yang dikembangkan anak melalui interaksinya dengan orang yang mempunyai arti khusus dalam kehidupannya, hubungan ini akan bertahan cukup lama. “Kelekatan merupakan suatu hubungan yang didukung oleh tingkah laku lekat (*attachment behavior*)” .attachment behavior adalah beberapa bentuk perilaku yang dihasilkan dari usaha seseorang untuk mempertahankan kedekatan dengan seseorang yang dianggap mampu memberikan perlindungan dari ancaman lingkungan terutama saat seseorang merasa takut, sakit dan terancam.<sup>23</sup>

b. Perencanaan Permanensi

Perencanaan permanensi adalah proses sistematis, dalam periode waktu yang singkat, guna melaksanakan satu rangkaian kegiatan yang dirancang untuk membantu anak-anak hidup dalam keluarga yang menawarkan kesinambungan hubungan dengan orang tua atau pemberi asuhan yang merawat serta kesempatan untuk membangun hubungan seumur hidup<sup>24</sup>

Teori ini menjelaskan bahwa pentingnya perencanaan pengasuhan anak secara permanen dari orang tua atau orang yang menjadi pengasuh. Apabila orang tua tidak dapat mengasuh anaknya dikarenakan meninggal dunia atau ketidakmampuan. Maksud dari ketidakmampuan adalah orang tua mengalami penyakit dan secara fisik atau psikis tidak memungkinkan memberikan pengasuhan, kemudian orang tua yang tidak mampu memberikan pengasuhan dikarenakan permasalahan ekonomi, serta terpisahnya orang tua dan anak karena

---

<sup>22</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 3.

<sup>23</sup> Zusy Aryanti, “Kelekatan dalam Perkembangan Anak,” *Jurnal Tarbawiyah* 12 (2015): hlm 245.

<sup>24</sup> Maluccio dalam, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, hlm 16

perang atau bencana alam. Anak dapat di asuh oleh saudara biologis bahkan dapat juga oleh orang yang tidak memiliki hubungan sedarah.<sup>25</sup>

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Sejarah Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK)

Program- program *Yayasan Sayangi Tunas Cilik Partner of Save the Children* Yogyakarta dimulai saat bertepatan dengan terjadinya gempa bumi di Yogyakarta. YSTC membantu anak-anak korban bencana dengan program *Emergency Response* yang bertujuan untuk memberikan pertolongan berupa perawatan dan penguatan sisi mental anak-anak korban bencana, kemudian program selanjutnya pada tahun 2009 sampai 2012 YSTC membantu anak-anak khususnya pekerja anak dengan adanya program *Eliminate Exploitive Child Labor through Education and Economic Development* (EXCEED). Program PDAK di Yogyakarta sendiri terlaksana pada tanggal 1 April 2012. Pada program ini merupakan program utama *Child Protection*. Rangkaian program di atas sesuai dengan yang disampaikan oleh Witrijani pada wawancara berikut :

“Awal sekali program YSTC itu untuk melakukan tanggap bencana tahun 2006, setelah itu mulai tahun 2009 sampai 2012 kita melaksanakan program EXCEED, program untuk membantu anak-anak yang ter eksploitasi, baru pertengahan 2012 kita dari pusat melaksanakan program PDAK”<sup>26</sup>

Program PDAK dari tahun 2012 sampai sekarang telah mendampingi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) guna menerapkan perlindungan dan pengasuhan anak berbasis keluarga. LKSA merupakan lembaga sosial yang dibentuk oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak baik anak yang berada di dalam maupun diluar lembaga kesejahteraan sosial. Jumlah LKSA dampingan PDAK pada tiap tahunnya pun mengalami dinamika yang dapat dilihat di digambar berikut:

<sup>25</sup>Maluccio, Module One : Principle Of Permanency Planning and child Protection, 1984, hlm 7

<sup>26</sup>Wawancara dengan Witri Jani, families first manager YSTC Yogyakarta, 20 september

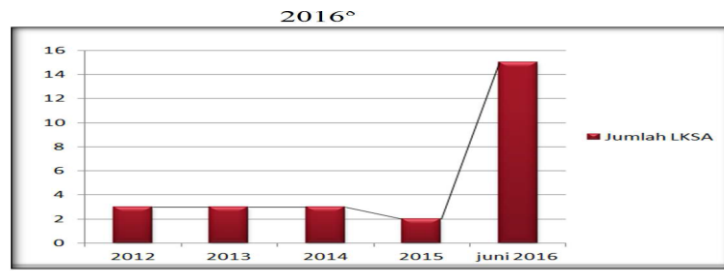


Diagram Jumlah LKSA dampingan PDAK pada Tahun 2012-2016<sup>27</sup>

Dari diagram di atas dijelaskan bahwa PDAK semenjak awal program hingga sekarang pada setiap tahunnya jumlah LKSA yang didampingi PDAK mengalami perubahan.

Sedangkan untuk total anak asuh pada tabel di atas merupakan anak asuh yang ada didalam panti asuhan dengan jumlah 574 anak yang menjadi dampingan dari PDAK panti-panti tersebut terbagi dalam 5 kabupaten dengan jumlah masing masing kabupaten adalah, Kabupaten Bantul yakni 3 panti asuhan, Kota Jogja yakni 3 panti asuhan, Kabupaten Sleman yakni 4 panti asuhan, Kabupaten Gunung Kidul yakni 2 panti asuhan, dan Kabupaten Kulon Progo yakni 3 panti asuhan, dengan demikian jumlah panti dampingan PDAK yang paling banyak terdapat di Kabupaten Sleman, dan yang sedikit di Kabupaten Gunung Kidul.

Program PDAK yang dilakukan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC) Partner Of Save the Children Yogyakarta memiliki ruang lingkup terbagi dalam sasaran dan tujuan. YSTC Yogyakarta membantu LKSA dalam melakukan implementasi perlindungan dan pengasuhan anak berbasis keluarga dengan cara peningkatan fungsi dan peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga dalam pengasuhan berbasis keluarga seperti, peningkatan penerapan SNPA untuk LKSA, melakukan pencegahan keterpisahan anak dari keluarga karena alasan penelantaran dan eksploitasi, serta penyediaan akses terhadap fasilitas rehabilitasi sosial dan layanan sosial lainnya<sup>28</sup>.

<sup>27</sup>Hasil Dokumentasi Jumlah LKSA dampingan, YSTC Yogyakarta, 2015, hlm 1

<sup>28</sup> Hasil Dokumentasi, Perjanjian Kerjasama (MOU) Antara Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Yogyakarta dan Save The Children Internationa, 2012, hlm 4.

Setiap program yang telah ditentukan memiliki sasaran dalam penerimaan program. Program PDAK ini terkait dengan perlindungan dan pengasuhan bagi anak-anak yang terpisah dari keluarganya, anak yang tinggal dipanti asuhan, anak-anak korban penelantaran, kekerasan, keterpisahan, dan eksploitasi yang berada di provinsi Yogyakarta<sup>29</sup>. Selain sasaran program, PDAK bertujuan untuk menyelenggarakan dukungan langsung secara profesional dan efektif kepada anak-anak yang membutuhkan pengasuhan dan perlindungan. Pengasuhan yang diupayakan oleh PDAK, seperti yang disampaikan secara singkat oleh Fajar Suryaman dalam wawancara berikut;

“...tujuan kita itu tentu melakukan assessment yang komperhensif dan intervensi yang sesuai dengan kondisi anak, tentunya juga pencegahan institusioanal,, emm maksudnya biar keputusan jangka panjangnya itu anak gak dimasukin ke panti asuhan,, gitu, nah Pusat Dukungan ini juga bertujuan untuk mengubah paradigma pengasuhan dipanti, emm jadi kita bersama dinas itu mengupayakan adanya penerapan pola asuh, contohnya Good Parenting itu gak cuma buar orang tua kandung, tapi juga semua orang yang berinteraksi langsung sama anaknya, kayak dari si pengasuh anak, staf,,, trus tentang kelekatan si anak, karan kan kelekatan ama permanency itu mendukung besok anak tinggal dengan siapa.”<sup>30</sup>

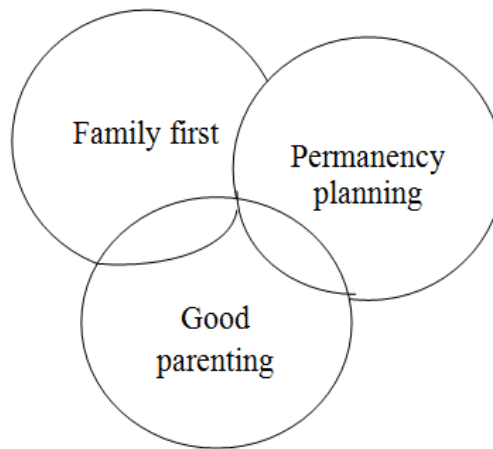
Maka dari kutipan wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat 3 pendekatan penanganan anak rawan yang dipandang efektif oleh YSTC (*family frist, good parenting dan permanency*), dan pendekatan-pendekatan itu dijadikan tujuan dari perbaikan manajemen pelayanan sosial di LKSA dampingan.

Gambar. 1.1  
Pendekatan pengasuhan

---

<sup>29</sup> Hasil Dokumentasi, Perjanjian Kerjasama (MOU) Anantara Kementrian Sosial RI, Dinas Sosial Yogyakarta dan Save The Children Internationa, 2012, hlm 4.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Direct Response Officer YSTC Yogyakarta, 22 juli 2016



## 2. Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA)

Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) merupakan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Indonesia yang berisikan norma dan kriteria sebagai panduan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam pelaksanaan pengasuhan anak. Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) merupakan standard yang dihasilkan dari beberapa riset yang telah dilakukan oleh *Save The Children Internasional* serta Kementerian Sosial RI.

SNPA merupakan acuan yang digunakan oleh *Yayasan Sayangi Tunas Cilik Partner of Save the Children* untuk memperbaiki manajemen pelayanan sosial di LKSA yang didampingi. Di dalam SNPA terdapat standar yang menerangkan prinsip-prinsip pengasuhan anak termasuk tentang sistem pengasuhan alternatif, pemenuhan semua aspek-aspek hak-hak anak menurut konvensi hak anak, transformasi peran LKSA untuk mendukung pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif berbasis keluarga, tahapan intervensi yang sesuai kebutuhan anak, peran pelaksana pengasuhan di LKSA, peran Dinas Sosial/ Instansi Sosial dalam penggunaan SNPA sebagai indikator-indikator penilaian dalam mengatur pendirian, perijinan dan akreditasi LKSA.<sup>31</sup>

Terdapat Standar Penentuan Respon Anak yang tepat, mencakup peran LKSA dalam pelayanan bagi anak dan perencanaan

---

<sup>31</sup>Hasil dokumentasi komponen utama Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA), hlm 7

pengasuhan. Terdapat indikator LKSA dalam melakukan penentuan respon anak yang tepat.

Tabel 1.1  
Indikator Standar Penentuan Respon Anak yang Tepat<sup>32</sup>

| Indikator   | Cakupan   |
|---|---|
| Standar Penentuan Peran LKSA dalam Pelayanan Bagi Anak. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)</li> <li>▪ Pencegahan dan keterpisahan</li> <li>▪ Peran untuk menerima rujukan</li> <li>▪ Respon berdasarkan <i>assessment</i> yang akurat</li> <li>▪ Respon terhadap kebutuhan pengasuhan</li> <li>▪ Respon terhadap kebutuhan perlindungan khusus</li> <li>▪ Respon terhadap kebutuhan ekonomi</li> <li>▪ Respon terhadap kebutuhan pendidikan</li> </ul> |
| Standar Perencanaan Pengasuhan                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencana pengasuhan</li> <li>▪ Pengasuhan darurat</li> <li>▪ Pengasuhan jangka panjang</li> <li>▪ Pengasuhan jangka pendek</li> <li>▪ Transisi menuju pengasuhan yang lebih permanen</li> </ul>   |

Ada juga Indikator lain yang sudah ditetapkan terkait dengan standar pelayan pengasuhan. Berikut beberapa poin penting dalam melaksanakan pengasuhan anak;

Table 1.2  
Indikator Standar Pelayanan Pengasuhan<sup>33</sup>

| Indikator                                      | Cakupan  |
|--|--|
| Standar Pendekatan Awal dan Penerimaan Rujukan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendekatan awal</li> <li>• Penerimaan rujukan</li> <li>• <i>Assessment</i> awal</li> <li>• Pengambilan keputusan pelayanan</li> <li>• Kesepakatan</li> <li>• Rujukan ke instansi lain</li> <li>• Kebersamaan anak bersaudara</li> </ul> |
| Standar Pelayanan Pengasuhan Oleh LKSA         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Assessment</i> dan Rencana Pengasuhan. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Assessment</i> lanjutan</li> <li>- Perencanaan <i>pengasuhan</i></li> </ul> </li> </ul>   |

<sup>32</sup> Buku Saku Standar Nasional Pengasuhan Anak, semesta ilmu, hal 30.

<sup>33</sup> Buku Saku Standar Nasional Pengasuhan Anak, semesta ilmu, hal 37.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan <i>Rencana</i> Pengasuhan           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan untuk anak dalam keluarga</li> <li>- Dukungan pengasuhan berbasis keluarga</li> <li>- Dukungan pengasuhan berbasis keluarga pengganti</li> <li>- Pengasuhan oleh orang tua asuh (<i>fostering</i>)</li> <li>- Perwalian</li> <li>- Pengangkatan anak</li> </ul> </li> </ul>  |
| Standar Pelayanan Berbasis LKSA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan pengasuhan dalam LKSA</li> <li>• Peran sebagai pengganti orang tua</li> <li>• Martabat anak sebagai manusia</li> <li>• Perlindungan anak</li> <li>• Perkembangan anak</li> <li>• Identitas anak</li> <li>• Relasi anak</li> <li>• Partisipasi anak</li> <li>• Makanan dan pakaian</li> <li>• Akses terhadap pendidikan dan kesehatan</li> <li>• Privasi/kerahasiaan pribadi anak</li> <li>• Pengaturan waktu anak</li> <li>• Kegiatan/pekerjaan anak di lembaga kesejahteraan sosial anak</li> <li>• Aturan, disiplin dan sanksi</li> </ul> |

Indikator yang terakhir pada SNPA adalah yang berisi tentang Standar Kelembagaan. Standar kelembagaan dimaksudkan agar tercapainya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang bermutu, berkapasitas, baik kelengkapan teknis, finansial, maupun sumber daya manusia. Standar ini kemudian dirinci sebagai berikut;

Table 1.3  
Indicator standar kelembagaan<sup>34</sup>

| Indikator                  | Cakupan   |
|----------------------------|---|
| Visi, misi dan Tujuan LKSA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki dasar-dasar sistem pengasuhan yang disediakan LKSA dengan memperhatikan kepentingan terbaik.</li> <li>• Pengimplementasian visi, misi, dan tujuan direview secara periodik dengan melibatkan</li> </ul> |

<sup>34</sup> Buku Saku Standar Nasional Pengasuhan Anak, semesta ilmu, hal 37.



|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | keluarga, anak-anak dan semua pelaksana pelayanan   |
| Berdirinya LKSA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.</li> <li>• Perizinan untuk menyelenggarakan pelayanan sosial melalui LKSA. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme perizinan</li> <li>- Peran Dinas Sosial / Instansi Sosial dalam pemberian izin dan monitoring pelayanan pengasuhan.</li> <li>- Assessment perpanjangan atau pembatalan perizinan</li> </ul> </li> <li>• Akreditasi</li> </ul> |
| Fasilitas       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan fasilitas</li> <li>• Fasilitas yang mendukung privasi anak</li> <li>• Fasilitas pendukung</li> <li>• Kesiapan menghadapi bencana</li> <li>• Pengaturan staf</li> <li>• Pendanaan</li> <li>• Jaringan kerja</li> <li>• Administrasi</li> <li>• Pencatatan dan pelaporan</li> <li>• Monitoring dan evaluasi.</li> </ul>   |

Indikator-indikator yang telah dijabarkan di atas merupakan hal-hal penting dalam melaksanakan pelayanan sosial berbasis alterinatif. Indikator-indikator tersebut juga merupakan pedoman bagi PDAK saat melakukan pengawasan pada LKSA dampingannya. Seperti yang disampaikan oleh witrijani dalam wawancara berikut:

“... prinsip dasarnya adalah memastikan bahwa panti itu emm memahami bahwa pengasuhan terbaik itu ada di dalam keluarga gitu.. em alasan ekonomi, alasan pendidikan itu tidak menjadi alasan yang tidak signifikan untuk menempatkan anak dipanti, terus kalo kita mengacunya ke inikan dibab tiga nya itu respon yang tepat gitu kan itu tentang bagaimana panti itu memberikan respon terhadap kasus yang dirujuk kesitu, terus kemudian di bab empatnya adalah di standar pelayanan yang kita lihat, yang terakhir standard pelayanan lembaganya,, ya sebenarnya patokan kita melakukan pengawan kita pakai itu ya istilahnya kitabnya lah.. 200 sekian kalo gak salah jumlahnya..”<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Wawancara dengan Witri Jani, families first manager YSTC Yogyakarta, 16 Agustus 2016.

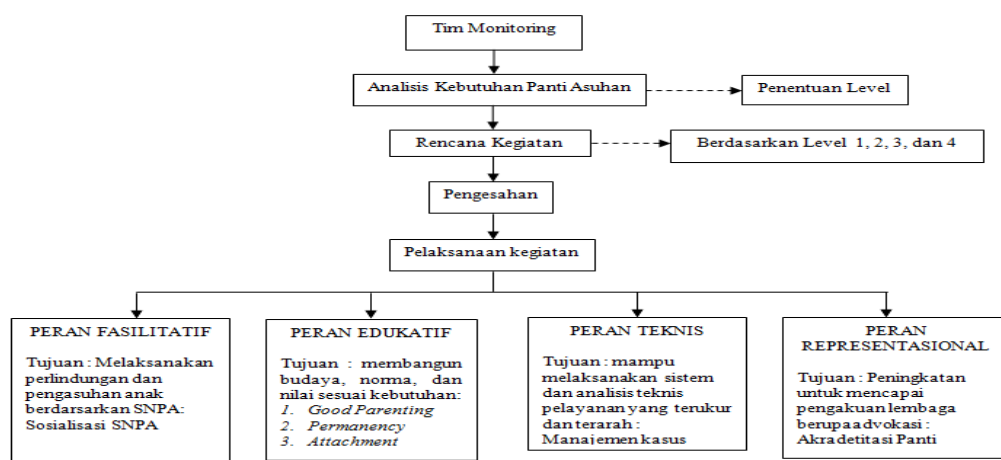
Dari penjelasan tersebut yang diimplementasikan ke LKSA, merupakan standar yang digunakan untuk pertama menentukan level (level 1,2,3, dan 4) kondisi LKSA yang nantinya akan mengarah pada tindakan kegiatan pendampingan. Indikator- indikator yang diterapkan pada saat pengawasan akan menghasilkan penilaian bagi setiap LKSA, penilaian tersebut akan menjadi catatan tersendiri apakah LKSA tersebut sudah mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan SNPA. Kemampuan LKSA akan dilihat dari level penilaian yang didapat.

### 3. Peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK)

Yayasan Sayangi Tunas Cilik *Partner of Save the Children* Yogyakarta dalam program PDAK mengupayakan adanya implementasi SNPA serta membangun pola budaya organisasi yang menerapkan perlakuan dan pengetahuan, sehingga terbangunnya manajemen pelayanan sosial yang mendukung usaha perlindungan dan pengasuhan anak berbasis keluarga.

LKSA sering kali tidak menyadari bahwa di lembaga tersebut memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk menunjang terbentuknya LKSA yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam hal ini peran PDAK adalah mendukung perlindungan dan pengasuhan berbasis keluarga pada LKSA melalui pengembangan.

Gambar 1.2 Alur Perlakuan Pendampingan PDAK<sup>36</sup>



<sup>36</sup>Bagan (modifikasi) urutan alur pendampingan Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK)

Dari gambar di atas dijelaskan bahwa, alur perlakuan pendampingan PDAK di mulai dari monitoring indikator-indikator SNPA yang dilakukan oleh Tim Monitoring, kemudian hasil dari monitoring akan dianalisis berdasarkan kebutuhan dan situasi anak. Guna merespon kebutuhan panti asuhan atau LKSA, PDAK melakukan rencana kegiatan yang terbagi dalam peran-peran pedampingan.

Pendampingan yang dilakukan oleh PDAK dalam meningkatkan kapasitas panti yakni berupa, peran Fasilitatif saat melaksanakan proses penerapan SNPA, peran Edukatif dalam membangun Budaya organisasi yang berbasis keluarga, peran *Representational* dalam meningkatkan pengakuan lembaga, serta peran teknis dalam pelaksanaan sistem dan analisis data saat pelayanan.

- a. Pembentukan Tim Monitoring, Analisis Kebutuhan Panti Asuhan, Rencana kegiatan

Pusat dukungan anak dan keluarga dalam menjalankan tugasnya melakukan pengorganisasian dengan membentuk tim monitoring. Tim tersebut bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Tim monitoring dalam menjalankan pengawasan terbagi menjadi 2 hal. Dalam satu bulan sekali melakukan monitoring terhadap perkembangan, peningkatan panti dan kelengkapan dalam pemberkasan akreditasi. Seperti yang disampaikan oleh novi dalam kutipan dibawah;

“kalo monitoring itu gak pasti, biasanya kalo monitoring kan pas bu prapti bisa terus ngasih kabar ke panti dan ngasih dan ngabarin kita, yaa bisa dibilang sebulan sekali tapi ya gak pasti aja tanggalnya. Biasanya pelayanan atau monitor perkembangan dan peningkatan kelengkapan akreditasi”<sup>37</sup>

Pada awal pembentukan sampai tahun 2016 Tim Monitoring mengalami perubahan dari jumlah dan anggotanya, perubahan ini terjadi karena adanya evaluasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti yang disampaikan oleh Witrijani;

“Kalo awal dulu dari 2012 sampai 2015 itu hanya terdiri dari emm dari kepala seksi perlindungan anak dinsos DIY... terus Dinsos kabupaten yang bersangkutan, terus Akademisi UIN.. emm

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Novi, Pekerja Sosial Kab. Bantul, 5 Agustus 2016 .

terus sama ketua forum panti DIY.. tapi kami melihat bahwa.. emm menjadi agak susah kalo misalnya di Dinas Sosial sendiri yang dilibatkan hanya dari seksi perlindungan anak.. karna ini sangat terkait dengan seksi-seksi yang lain emm misalnya seksi organisasi sosial, seksi program... sehingga dimulai tahun 2016 ini kita juga melihatkan seksi lain yaitu kepala seksi organisasi sosial sama dari seksi progam.., terus ada penambahan lagi dari UIN.. emm bu Rofah...ada penambahan juga dari emm balai diklat kemensos dia kayak semacam staf ahlinya yang sering dimintai emm ya kayak utamanya dinas sosialnya... jadinya kita berharap banyak dari mereka-mereka gitu..”<sup>38</sup>

Setiap anggota Tim Monitoring sendiri akan memastikan setiap panti yang didampingi sudah melaksanakan sistem pengasuhan yang sesuai dengan SNPA. Tim monitoring akan melakukan identifikasi kebutuhan yang belum bisa dicapai oleh panti. Analisis kebutuhan akan dipertimbangkan pula berdasarkan situasi anak dipanti, analisis situasi ini dilakukan melalui pendekatan ekologi yang mempertimbangkan situasi anak dan keluarga, latar belakang keluarga, serta kondisi komunitas dimana anak berada. Dari hasil analisis berdasarkan kebutuhan anak dan Indikator-Indikator SNPA, akan terlihat penilaian panti pada level berapa pelayanannya. Analisis ini dilakukan agar dapat merumuskan rencana kegiatan berdasarkan level 1, 2, 3, dan 4, kemudian tindak lanjut rencana kegiatan ini disusun oleh PDAK.

b. Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif yang dilakukan oleh PDAK pada LKSA dampingan, merupakan peran penting dalam proses awal penerapan SNPA. Bentuk peran fasilitatif yang dilakukan PDAK adalah dengan melakukan koordinasi dan dukungan tentang SNPA kepada LKSA.

Koordinasi yang dilakukan adalah dalam bentuk pertemuan Sosialisasi formal. Pertemuan ini akan dihadiri oleh LKSA yang menjadi dampingan, khususnya seperti staf, pengasuh dan ketua Panti Asuhan. PDAK dalam sosialisasi ini memperkenalkan dan memaparkan pola-pola, nilai, norma tentang bagaimana pengasuhan alternatif yang sesuai dengan SNPA, mendukung

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Witri Jani, families first manager YSTC Yogyakarta, 16 Agustus 2016.

penerapkan fungsi-fungsi pelayanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan anak. Rose mery juga menambahkan sosialisai ini juga bertujuan untuk *“meningkatkan profesionalisme dan menambah kepercayaan diri panti.”*<sup>39</sup>

c. Peran edukatif

Peran Edukatif yang dilakukan PDAK dalam pelatihan dan penyampaian informasi, PDAK mengupayakan adanya perbaikan dalam sisi budaya, norma, nilai yang diterapkan di Panti Asuhan.

1) Pelatihan

2) Dalam kegiatan pelatihan memberikan pemahaman terhadap Panti Asuhan dalam bagaimana bersikap kepada anak asuhnya. pelatihan yang diberikan oleh PDAK adalah pengetahuan tentang pengasuhan berbasis keluarga yang terbagi dalam *Good Parenting, permanency planning, dan attachment*.

PDAK juga melakukan pertemuan untuk meningkatkan kemampuan dengan dukungan tenaga professional dalam dengan bentuk konseling kasus. Konseling kasus yang dilakukan adalah bertujuan untuk secara rinci membahas hambatan, serta mendiskusikan good parenting di LKSA ataupun tentang kasus anak. Adanya kelemahan panti asuhan seperti *“kami gagap betul dalam soal parenting, permanensi itu kami juga gak terlalu paham gimana sih mbak”*<sup>40</sup>.

d. Peran teknik

Dalam peran ini, yang dilakukan Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) adalah dalam mengatur peran teknis seperti analisis data saat melakukan intervensi pada anak asuh di Panti Asuhan. Bentuk Peran Teknik ini adalah berupa workshop dengan pendekatan yang digunakan oleh PDAK adalah *“Manajemen Kasus”* pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, metode, dan keterampilan dalam melaksanakan intervensi kasus anak

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Rose Mery, Project officer gate keeping YSTC Yogyakarta, 15 Agustus 2016

<sup>40</sup> Wawancara dengan Nurul Hidayah, staf Panti Asuhan YAPITU Al-Huda Pucung, 15 September 2016

dengan memastikan terpenuhinya *family first*, *permanency*, dan *good parenting* sehingga efisien dan efektif.

e. Peran Perwakilan (*Representasional*)

Peran perwakilan tentunya juga menjadi salah satu tujuan yang sedang dilakukan oleh Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) pada Panti Asuhan dampungnya, peran ini mengupayakan advokasi berupa pengakuan dan kemandirian Panti Asuhan dalam menjalankan pelayanan sosial, adapun peran PDAK adalah melakukan advokasi dalam hal Akreditasi LKSA.

## E. PENUTUP

Berdasarkan dari uraian yang telah peneliti kemukakan dan analisis hasil penelitian mengenai "*Peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) dalam Membangun Manajemen Pelayanan Sosial di Panti Asuhan Yogyakarta*" dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. *Yayasan Sayangi Tunas Cilik Partner of Save the Children* dalam program Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) mendorong terbentuknya *family first, permanency planning, dan good parenting* yang didukung menggunakan pemahaman kelekatan. Kelekatan merupakan ikatan emosial antara anak dengan pengasuh sehingga mendukung kehidupan anak dalam keluarga, dan merupakan manifestasi dari konsep kekeluargaan.
2. Manajemen pelayanan sosial yang dilakukan oleh YSTC terhadap LKSA dampungannya itu meliputi strategi pelayanan yang berbasis keluarga (*family first, dan good parenting*), serta melakukan pendampingan dalam akreditasi LKSA. Selain itu penerapan konsep berbasis keluarga dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di LKSA dilakukan dengan cara pengawasan yang dilakukan oleh Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) merupakan penerapan yang sistematis dan sesuai dengan kebutuhan anak. Pengawasan terbagi dalam tiga Indikator-Indikator SNPA yakni standard penentuan respon yang tepat bagi anak, standar pelayanan pengasuhan, dan standar kelembagaan. Sehingga dari penerapan tersebut dapat direkomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan tentang keefektifan dari penerapan SNPA di LKSA.

3. Peran- peran yang dilakukan Pusat Dukungan Anak dan Keluarga(PDAK) dalam membangun manajemen pelayanan sosial di Panti Asuhan meliputi peran fasilitatif, peran edukatif, peran perwalian, dan peran teknis. Dalam peran fasilitatif yang dilakukan PDAK diantaranya sebagai koordinator, pemberi dukungan, dan memfasilitasi kelompok. Peran edukatif meliputi pelatihan dan penyampaian informasi. Peran perwakilan meliputi advokasi berupa usaha pengakuan dan kemandirian LKSA. Peran teknis berupa pengembangan analisis data berupa manajemen kasus. Semua peran pendampingan yang dilakukan PDAK adalah untuk meningkatkan pengasuhan berbasis keluarga dan menanamkan budaya *good parenting*, serta guna mendukung pengakuan sistem pelayanan LKSA melalui akreditasi LKSA.

#### F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. *Menejemen Organisasi*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1997.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Aryanti, Zusy. "Kelekatan dalam Perkembangan Anak." *Jurnal Tarbawiyah* 12 (2015).
- Badan Pusat Statistik, Indonesia Dalam Angka, 2015
- Departemen Sosial RI. *Model Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Keluarga dengan Pendekat Multisystem*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, 2004.
- Hejirachman, Ranupandojo. *Teori dan Konsep Manajemen*. Yogyakarta: UPP-AMPYKPN, 2014.
- Kurnia, Ajat. "Empowering dan Networking: Alternatif Penanggulangan Anak Jalanan." *Jurnal ilmiah Peksos* 3, no. 2 (2004): 489.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

- P, Agus Joko. *Teori Organisasi*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2010.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Taufik Makarao, Dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Reneka Cipta, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak